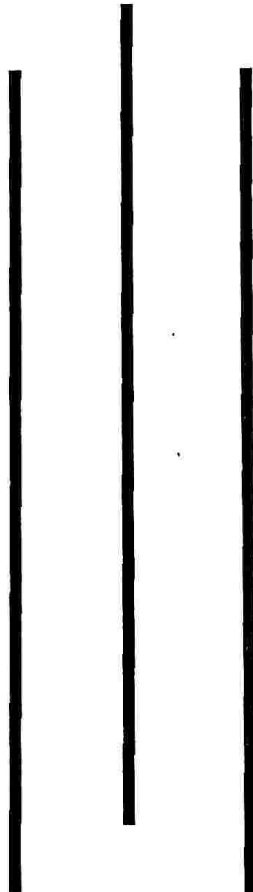


**PERATURAN LURAH KARANGTENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN LURAH
KARANGTENGAH NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN PERATURAN
KALURAHAN NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

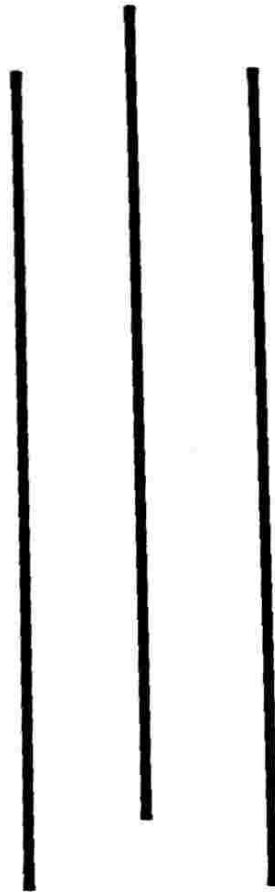


**KALURAHAN KARANGTENGAH
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**PERATURAN LURAH KARANGTENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN LURAH
KARANGTENGAH NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN PERATURAN
KALURAHAN NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021**



**KALURAHAN KARANGTENGAH
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGGIDUL**



**LURAH KARANGTENGAH
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**PERATURAN LURAH KARANGTENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN LURAH KARANGTENGAH NOMOR 11 TAHUN
2020 TENTANG PENJABARAN PERATURAN KALURAHAN NOMOR 9
TAHUN 2020 TENTANG APBKAL TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KARANGTENGAH,

Menimbang: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Kalurahan Nomor 9 Tahun 2020 Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021, maka perlu menyusun Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Karangtengah Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6

- Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 90);
 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Kalurahan Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 112);
 19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kalurahan Di Setiap Kalurahan Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 5);
 20. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karangtengah Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Desa Karangtengah Tahun 2016 Nomor 4);
 21. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Karangtengah Tahun 2019 Nomor 8);
 22. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Desa Karangtengah Tahun 2019 Nomor 7);
 23. Peraturan Kalurahan Karangtengah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Karangtengah Tahun 2020 Nomor 8);
 25. Peraturan Kalurahan Karangtengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan

Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Karangtengah Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN LURAH KARANGTENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN
PERATURAN KALURAHAN NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG APBKAL TAHUN ANGGARAN 2021**

Pasal 1

Perubahan Peraturan Lurah Karangtengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penjabaran Peraturan Kalurahan Nomor 9 Tahun 2020 Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:

1. Pendapatan Kalurahan			
1.1 Pendapatan Asli Kalurahan			
a Semula	Rp	33.735.000,-	
b Bertambah / (Berkurang)	Rp	0,-	
Jumlah Pendapatan Asli Setelah Perubahan	Rp	33.735.000,-	
1.2 Transfer			
a Semula	Rp	1.956.777.600,-	
b Bertambah / (Berkurang)	Rp	317.905.000,-	
Jumlah Transfer Setelah Perubahan	Rp	2.274.682.600,-	
1.3 Lain-lain Pendapatan yang sah			
a Semula	Rp	6.500.000,-	
b Bertambah / (Berkurang)	Rp	0,-	
Jumlah Pendapatan Yang Sah Setelah Perubahan	Rp	6.500.000,-	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp	2.314.917.600,-	
2. Belanja Kalurahan			
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan			
a Semula	Rp	906.243.613,39	
b Bertambah / (Berkurang)	Rp	63.757.500,-	
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	970.001.113,39	
2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan			
a Semula	Rp	741.867.100,-	
b Bertambah / (Berkurang)	Rp	164.541.000,-	
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	906.408.100,-	

2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
	a Semula	Rp	21.610.000,-
	b Bertambah / (Berkurang)	Rp	0,-
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp	21.610.000,-
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
	a Semula	Rp	22.021.300,-
	b Bertambah / (Berkurang)	Rp	7.225.000,-
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp	29.246.300,-
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak		
	a Semula	Rp	388.864.000,-
	b Bertambah / (Berkurang)	Rp	82.381.500,-
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp	471.245.500,-
	Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp	2.398.511.013,39
	Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	(Rp	83.593.413,39)
3.	Pembiayaan Kalurahan		
3.1	Penerimaan Pembiayaan		
	a Semula	Rp	83.593.413,39
	b Bertambah / (Berkurang)	Rp	0,-
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp	83.593.413,39
3.2	Pengeluaran Pembiayaan		
	a Semula	Rp	0,-
	b Bertambah / (Berkurang)	Rp	0,-
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp	0,-
3.3	Selisih Pembiayaan (3.1 - 3.2)		
	a Semula	Rp	83.593.413,39
	b Bertambah / (Berkurang)	Rp	0,-
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp	83.593.413,39
	SILPA Tahun Anggaran Berjalan Setelah Perubahan	Rp	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini,

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam Peraturan Lurah ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Karangtengah.

Ditetapkan Di Karangtengah
Pada Tanggal 9 April 2021



Diundangkan Di Karangtengah
Pada Tanggal 9 April 2021



BERITA KALURAHAN KARANGTENGGA TAHUN 2021 NOMOR 2